



Workshop Instrumen Akreditasi Puskesmas Di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang

¹**Eviheryanto, ²*Rizma Adlia Syakurah**

¹Mahasiswa Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan
Masyarakat, Universitas Sriwijaya

²Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat,
Universitas Sriwijaya

*Corresponding Author e-mail: rizma.syakurah@gmail.com

Received: Januari 2023; Revised: Januari 2023; Published: Februari 2023

Abstrak: Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan upaya kesehatan bagi masyarakat. Sebagai upaya dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, Pemerintah menetapkan kegiatan akreditasi sebagai persyaratan mutu pelayanan di Puskesmas. Kegiatan workshop diadakan oleh Pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang agar mutu pelayanan Puskesmas di wilayah kerjanya menjadi lebih baik. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan kegiatan workshop instrumen akreditasi puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang. Kegiatan dilaksanakan di ruang pertemuan Hotel PIA Kota Pangkalpinang pada bulan Maret hingga April tahun 2020. Peserta kegiatan sebanyak 45 orang. Kegiatan dilaksanakan dengan melihat pelaksanaan workshop pada petugas Puskesmas mengenai pemahaman instrumen akreditasi Puskesmas melalui pendekatan manajemen proyek. Data didapatkan dari wawancara, observasi serta dokumentasi selama kegiatan workshop dilakukan. Hasil dari kegiatan ini kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk narasi. Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan manajemen proyek yang terdiri dari tahap inisiasi kegiatan, tahap perencanaan, tahap implementasi, tahap monitoring dan supervisi serta tahap evaluasi dan pelaporan. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian bahwa kegiatan workshop telah berjalan dengan lancar namun masih ditemukan beberapa kendala baik internal maupun eksternal antara lain kurangnya koordinasi antar tim kerja dan peserta yang kurang aktif.

Kata Kunci: Akreditasi; Manajemen Proyek; Puskesmas

Workshop on Accreditation Instruments for Health Centers in the Pangkalpinang City Health Office's Work Area

Abstract: The health center is the community's first-level health facility, in charge of organizing health efforts. The government requires accreditation activities as a requirement for service quality at health centers in order to improve the quality of health services. The Pangkalpinang City Health Office hosted workshops to improve the quality of health center services in their working areas. This activity aims to see the accreditation instrument workshop activities for the health center implemented in the Pangkalpinang City Health Office's work area. From March to April 2020, the training was held at the PIA Hotel meeting room in Pangkalpinang City. The activity drew 45 people. Through a project management approach, the activity was carried out by looking at the implementation of workshops for health center officers on understanding health center accreditation instruments. During the workshop activities, data were gathered through interviews, observations, and documentation. The outcomes of this activity are then processed and narratively presented. This activity is implemented using a project management approach that includes the following stages: activity initiation, planning, implementation, monitoring and supervision, and evaluation and reporting. The workshop activities went off without a hitch thanks to the outcomes of the community service activities. However, there were still some internal and external challenges, such as better coordination among work teams and more active participants.

Keywords: Accreditation; Project management; Public health center

How to Cite: Eviheryanto, E., & Syakurah, R. A. (2023). Workshop Instrumen Akreditasi Puskesmas Di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang . *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 5(1), 184-192. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v5i1.1098>



<https://doi.org/10.36312/sasambo.v5i1.1098>

Copyright©2023 Eviheryanto & Syakurah

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Puskesmas memiliki peran sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan upaya kesehatan, baik upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif (Ulumiyah, 2018). Diperlukan adanya peningkatan mutu agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas semakin baik. Kemenkes RI menetapkan bahwa upaya peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas dapat dilakukan dengan pengecekan akreditasi (Wulandari et al., 2019);(Septiany et al., 2021). Akreditasi Puskesmas digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan perlindungan bagi pasien di Puskesmas (Molyadi & Trisnantoro, 2018). Penelitian menyebutkan bahwa adanya pelaksanaan akreditasi menyebabkan pelayanan kesehatan di Puskesmas menjadi lebih baik serta cepat tanggap dalam menentukan diagnosis dan pemberian obat pada pasien (Fernandez et al., 2021).

Pelaksanaan akreditasi Puskesmas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap manajemen Puskesmas, penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat, serta upaya Kesehatan Perorangan dengan menggunakan standar akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk memenuhi ketentuan standar pemahaman akreditasi Puskesmas tersebut, petugas kesehatan memiliki hak untuk mengikuti pelatihan. Pemahaman standar akreditasi Puskesmas bertujuan agar pegawai Puskesmas memahami standar dokumen akreditasi Puskesmas sehingga sistem pelayanan klinis dan penyelenggaraan upaya Puskesmas, yang didukung oleh tata kelola yang baik, mempunyai komitmen yang tinggi untuk menyediakan pelayanan yang bermutu, aman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan kebijakan Pemerintah mengenai pengelolaan Puskesmas bahwa setiap Puskesmas wajib memiliki akreditasi dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2014 sehingga petugas pun disarankan untuk mengikuti pelatihan mengenai instrument akreditasi Puskesmas. Dalam pelaksanaan pelatihan kepada petugas Puskesmas, ditemukan beberapa masalah yang dapat menghambat kelancaran kegiatan.

Hasil identifikasi kegiatan menemukan bahwa terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan kegiatan workshop mengenai pemahaman akreditasi Puskesmas di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang. Masalah tersebut antara lain mutu pelayanan Puskesmas yang masih kurang, masih ada pegawai (SDM) Puskesmas yang belum memahami standar dokumen akreditasi Puskesmas serta Dokumen akreditasi di Puskesmas serta masih terdapat di Puskesmas yang tidak terstandar sesuai akreditasi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan

workshop instrumen akreditasi Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk workshop mengenai pemahaman petugas Puskesmas dalam menggunakan instrument akreditasi Puskesmas. Kegiatan dilaksanakan di ruang pertemuan Hotel PIA Kota Pangkalpinang pada bulan Maret hingga April tahun 2020. Peserta yang mengikuti workshop yaitu sebanyak 45 orang perwakilan 9 Puskesmas terkait. Pelaksanakan kegiatan pengabdian menggunakan pendekatan manajemen proyek yang terdiri dari tahap inisiasi kegiatan, tahap perencanaan, tahap implementasi, tahap monitoring dan supervise, serta tahap evaluasi dan tahap pelaporan. Kegiatan dilaksanakan dengan pembahasan instrument akreditasi yang telah dipersiapkan oleh tim Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang. Media yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu *Powerpoint* untuk membantu proses penjelasan kegiatan. Hasil kegiatan dilihat berdasarkan lancarnya pelaksanaan kegiatan workshop. kemudian dibuat laporan dan diserahkan pada Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang.

HASIL DAN DISKUSI

1. Tahap Inisiasi Kegiatan

Tahap inisiasi kegiatan merupakan tahapan awal terbentuknya gagasan yang dapat disalurkan oleh kedua pihak, dalam hal ini yaitu pihak Puskesmas dan pihak Dinas Kesehatan (Ramdani et al., 2021). Berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya, terdapat 3 kesenjangan yang ditemukan pada kegiatan ini yaitu mutu pelayanan Puskesmas yang masih kurang, pegawai Puskesmas yang belum memahami standar akreditasi Puskesmas serta dokumen akreditasi di Puskesmas masih ada yang belum terstandar sesuai dengan standar dokumen akreditasi Puskesmas. Mutu pelayanan Puskesmas yang masih kurang tanpa disadari dapat mengakibatkan pasien meninggalkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan juga dapat menceritakannya pada orang sekitar (Tawalujan et al., n.d.). Maka dari itu perlunya pelaksanaan akreditasi agar pihak Puskesmas dapat menyalurkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Petugas Puskesmas masih banyak yang belum memahami standar akreditasi serta dokumen Puskesmas padahal apabila petugas Puskesmas memahami dengan jelas mengenai standar akreditasi dan dokumen di Puskesmas maka hal tersebut dapat membantu Puskesmas untuk mencapai keberhasilan dalam akreditasinya (Diana, 2020). Selain itu, petugas yang telah paham mengenai penyusunan dokumen di Puskesmas juga dapat mempercepat proses pelaksanaan akreditasi (Stevani, 2019). Hal tersebut menyebabkan banyaknya dokumen-dokumen di Puskesmas yang tidak sesuai dengan standar dokumen akreditasi Puskesmas.

Penelitian mengatakan bahwa penyebab tidak puas nya masyarakat akan mutu pelayanan Puskesmas dikarenakan hasil perawatan yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan meskipun petugas medis telah melakukan pelayanannya dengan teliti (Moudy & Syakurah,

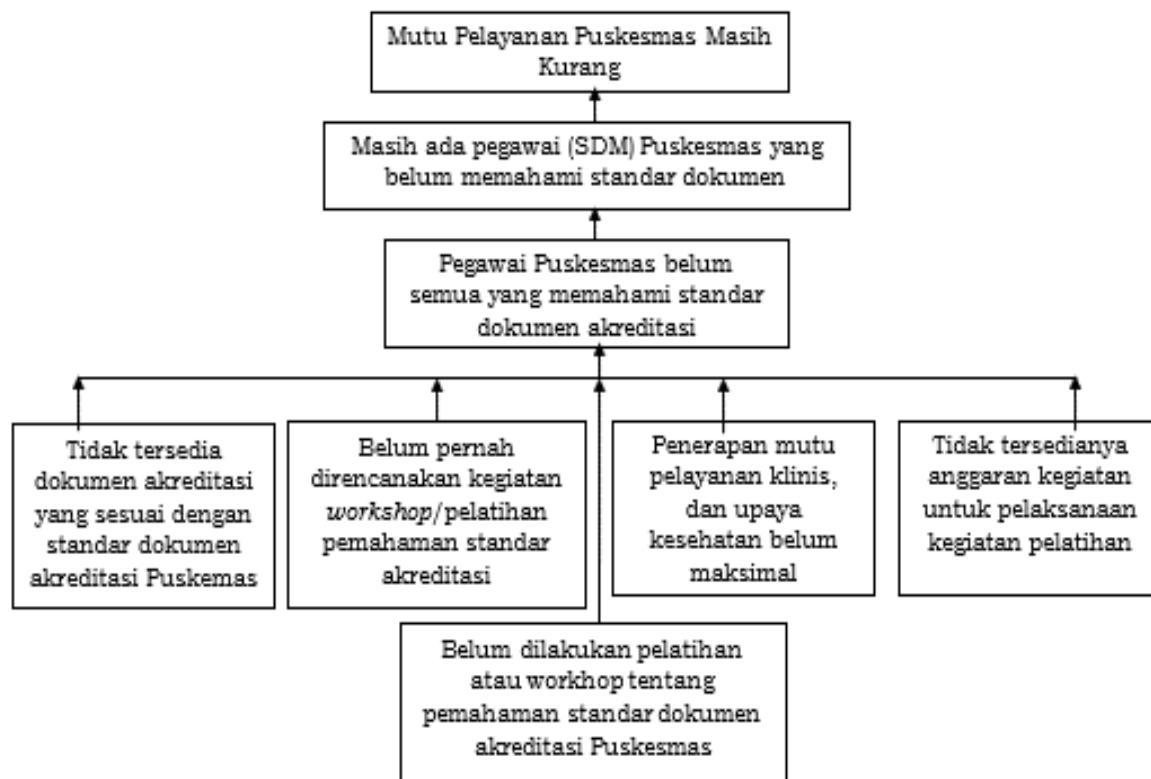
2022). Pasien melihat pelayanan kesehatan yang bermutu dari berbagai faktor baik dari faktor petugas medis maupun sarana dan prasarana dalam pelayanannya sehingga perbaikan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas perlu dilakukan (Jalias et al., 2020).

Berdasarkan kesenjangan yang ditemukan, maka ditetapkan prioritas masalah. Penetapan prioritas masalah dianggap penting agar penyelesaian masalah dapat sesuai dengan urgensi (Sofiana et al., 2020). Prioritas masalah dapat dilihat seperti pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Prioritas Masalah

No	Masalah Pokok			U	S	G	TTL	Prioritas
1	Mutu Pelayanan Puskesmas			5	5	4	14	I
2	Masih ada pegawai (SDM) Puskesmas yang belum memahami standar dokumen akreditasi Puskesmas			5	4	4	13	II
3	Dokumen akreditasi di Puskesmas masih ada yang belum terstandar berdasarkan standar dokumen akreditasi Puskesmas			4	4	4	12	III

Berdasarkan prioritas masalah yang ditentukan berdasarkan analisis USG, maka dibuat analisis masalah menggunakan pohon masalah sebagai berikut (Gambar 1).



Gambar 1. Pohon Masalah Kurangnya Mutu Pelayanan Puskesmas

Tabel 2. Cost Benefit Analysis

No	Alternatif	Manfaat (Benefit)	Biaya (Cost)	Ratio
1	Mutu Pelayanan Puskesmas masih kurang	5	2	2,5
2	Masih ada pegawai (SDM) Puskesmas yang belum memahami standar dokumen akreditasi Puskesmas	4	3	1,3
3	Dokumen akreditasi di Puskesmas masih ada yang belum terstandar berdasarkan standar dokumen akreditasi Puskesmas	3	4	0,75

Berdasarkan hasil analisis masalah tersebut, mutu pelayanan Puskesmas masih menjadi masalah utama dengan ratio 2,5. Mutu pelayanan kesehatan merupakan hak yang dimiliki semua masyarakat yang harus dipenuhi (Moudy & Syakurah, 2022). Mutu pelayanan kesehatan yang meningkat juga dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat sehingga masyarakat yang akan memeriksakan kesehatannya dapat mempercayakan diri kepada Puskesmas (Fatrida & Saputra, 2019).

Inisiasi kegiatan diawali dengan melakukan pertemuan dan mengidentifikasi masalah akreditasi yang terjadi Puskesmas. Kegiatan dilaksanakan selama bulan Januari 2020. Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Kegiatan Anggara (RKA) disusun sebagai upaya kelancaran kegiatan. Segala persiapan diatur dengan baik yang kemudian akan dilakukan rapat bersama tim pelaksana kegiatan pada bulan Maret 2020.

Tahap Perencanaan

Kegiatan workshop instrument akreditasi Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Puskesmas mengenai standar dan instrumen akreditasi serta sebagai persiapan pelaksanaan akreditasi dan reakreditasi. Kegiatan workshop dilakukan dengan menyampaikan materi mengenai kebijakan peningkatan standar mutu serta kriteria elemen penilaian Puskesmas dan pemahamannya. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 maret 2020 hingga 4 April 2020 di ruang pertemuan Hotel PIA Pangkalpinang dengan sumber dana kegiatan yang didapatkan dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang melalui dana DAK. Peserta kegiatan terdiri dari Kepala Puskesmas, Ketua Mutu, Penanggungjawab Admin, Penanggungjawab UKM dan Penanggungjawab UKP sedangkan narasumber yang akan memberikan pembelajaran terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Surveyor Akreditasi serta Pendamping Akreditasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memberikan informasi mengenai instrumen akreditasi lalu mengadakan diskusi dan praktik secara langsung.

Tahap perencanaan dilakukan dengan membentuk tim kerja yang akan membantu dalam proses pelaksanaan kegiatan. Tim kerja dibentuk sebagai pelaksana kegiatan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan. Tim pelaksana kegiatan terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas

Kesehatan, Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan serta Staf Administrasi Bidang Pelayanan Kesehatan. Adapun tugas tim kerja terdiri dari (Tabel 4).

Tabel 4. Tim Pelaksana Kegiatan

Tim Kerja		Uraian Tugas		Ket
Kepala Kesehatan	Dinas	Mempunyai kewenangan sebagai penanggungjawab kegiatan, membuat kebijakan, narasumber		Sesuai SK
Sekretaris		Mengarahkan kegiatan agar berlangsung sesuai dengan perencanaan		Sesuai SK
Kepala Bidang		Ketua pelaksana, bertanggung jawab terlaksananya kegiatan		Sesuai SK
Kepala Pelayanan	Seksi	Sekretaris, mempersiapkan dan mengkoordinasikan kepada semua tim terlibat		Sesuai SK
Kepala Seksi SDK		Sebagai penghimpun data SDMK		Sesuai SK
Staf Administrasi		Mempersiapkan semua dokumen pelaksanaan, keuangan, administasi		Sesuai SK

2. Tahap Implementasi

Tahap implementasi merupakan tahapan pelaksanaan dari perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya (Pitrianti & Syakurah, 2022). Tahap implementasi kegiatan pada penelitian ini diawali dengan membuat undangan oleh panitia kegiatan yang ditujukan kepada 9 Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang. Peserta yang akan mengikuti kegiatan ini ditetapkan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan yaitu petugas yang bersedia menandatangani komitmen untuk tidak mengusulkan atau diusulkan pindah dari tempat tugas sekarang. Peserta akan diminta untuk melakukan registrasi kehadiran dengan mengisi daftar hadir dan diberikan name tag beserta perlengkapan Map berisi ATK. Penempatan tempat duduk dipisah berdasarkan dengan perwakilan Puskesmas masing-masing. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai, maka setiap peserta akan dibagikan sertifikat.

Kegiatan workshop dimulai pada tanggal 30 Maret 2020 dengan membahas instrument akreditasi yang dimulai pada bab 1. Pembahasan instrument akreditasi dibagi menjadi 9 bab dan dibahas selama 6 hari pelaksanaan kegiatan, yaitu dimulai pada tanggal 30 Maret 2020 hingga 4 April 2020. Diskusi dilakukan antara peserta dan narasumber agar pemahaman peserta menjadi lebih baik. Proses diskusi merupakan proses yang sangat penting dalam pembelajaran kelompok karena akan semakin banyak pengetahuan baru yang didapatkan (Oktavia et al., 2021).

3. Tahap Monitoring dan Supervisi

Kegiatan monitoring dan supervisi bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang dibuat, serta melihat apakah hasil kegiatan telah tercapai (Novia &

Syakurah, 2022). Kegiatan monitoring dan supervisi dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan dengan cara mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Tahapan kegiatan monitoring dan supervisi dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Dari hasil pelaksanaan monitoring ditemukan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam kegiatan workshop ini. Kendala internal yang dihadapi oleh panitia wokshop yaitu tim kerja yang tidak berkoordinasi dengan baik sejak kegiatan dipersiapkan hingga tahap pelaksanaan. Padahal koordinasi yang baik dapat berdampak pada keberhasilan tim kerja terhadap suatu pelayanan (Ningrum, 2020). Selain itu fasilitas yang disiapkan oleh panitia masih kurang lengkap. Fasilitas dapat membantu mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga jika fasilitas yang disediakan kurang maka dapat menyebabkan ketidakpuasan pasien dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut (Alhayra et al., 2022);(Syafi'i et al., 2022).

Kendala eksternal yang dihadapi pada kegiatan ini antara lain banyaknya peserta yang datang terlambat serta kurangnya interaksi antara narasumber dan peserta akibat peserta yang kurang aktif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang mengatakan bahwa interaksi antara narasumber dan peserta masih banyak yang kurang di sebuah kegiatan. Narasumber lebih aktif dalam kegiatan namun peserta kurang aktif sehingga interaksinya kurang (Firmansyah & Ratnaningsih, 2019).

4. Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi dilakukan untuk menilai keseluruhan kinerja kegiatan tersebut yang terdiri dari penyelenggara, peserta, metode yang digunakan, tim kerja dan peralatan yang digunakan, dimana nantinya hasil evaluasi ini untuk menentukan kebijakan yang akan diambil untuk intervensi tindak lanjut (Zulkarnaen et al., 2020). Dari hasil evaluasi kegiatan workshop ini ditemukan bahwa peserta yang berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan telah memahami standar dokumen/instrumen akreditasi sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menjelaskan bentuk elemen penilaian yang diminta seperti dokumen SK, SOP, Juknis, serta bentuk telusur papan pengumuman. Selain itu, Peserta juga mampu menuangkan aturan penulisan dalam bentuk tata naskah yang berlaku di wilayah kerjanya.

Hasil kegiatan workshop mengenai instrumen akreditasi Puskesmas kemudian akan disusun menjadi sebuah laporan. Laporan ini dibuat setelah semua kegiatan selesai dilakukan. Laporan berisi capaian hasil program, dokumentasi serta dokumen penunjang lainnya. Laporan yang telah dibuat kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan ke bagian perencanaan yang digunakan untuk menyusun laporan capaian kinerja dinas kesehatan kota Pangkalpinang. Dalam kegiatan workshop instrumen akreditasi Puskesmas, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan. Evaluasi yang dilakukan pada tahap persiapan kegiatan berupa kapasitas peserta dalam ruangan telah memadai, lamanya waktu pelaksanaan, konsumsi yang disiapkan serta tingkat kehadiran peserta kegiatan.

KESIMPULAN

Kegiatan workshop instrumen akreditasi Puskesmas dilakukan karena petugas Puskesmas yang masih belum memahami standar akreditasi serta pendokumenan di Puskesmas. Kegiatan ini menggunakan pendekatan manajemen proyek yang terdiri dari tahap inisiasi kegiatan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap monitoring dan supervisi serta tahap evaluasi dan pelaporan. Dari hasil kegiatan didapatkan bahwa pelatihan mengenai instrumen akreditasi Puskesmas berjalan dengan lancar hingga akhir. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala baik kendala internal maupun eksternal.

REKOMENDASI

Diharapkan kepada Pemerintah agar lebih tegas dalam pelaksanaan akreditasi di Puskesmas serta kepada petugas Puskesmas agar dapat menerapkan pemahaman yang didapatkan dari workshop dengan baik.

ACKNOWLEDGMENT

Terima kasih diucapkan kepada seluruh tim pelaksana kegiatan workshop instrumen akreditasi puskesmas yang telah menjalankan tugas dengan baik sehingga kegiatan workshop berjalan dengan lancar.

REFERENCES

- Alhayra, A. R., Ruma, Z., & Natsir, U. D. (2022). Pengaruh Fasilitas Kantor terhadap Motivasi Kerja Pegawai Puskesmas Herlang Kabupaten Bulukumba. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(5), 303–314.
- Diana, Y. (2020). Pengaruh Job Description terhadap Kinerja Karyawan di Departemen Tata Hidang pada Hotel Grand Ion Delemen Malaysia. *Jurnal Manajemen Tools*, 12(2), 123–139.
- Fatrida, D., & Saputra. (2019). Hubungan Waktu Tunggu dengan Tingkat Kepuasan Pasien dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Aisyiyah Medika*, 4(1), 11–21.
- Fernandez, L. D. I., Kenjam, Y., & Dodo, D. O. (2021). Mutu Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pasir Panjang Pasca Akreditasi. *Media Kesehatan Masyarakat*, 3(3), 276–285.
- Firmansyah, I., & Ratnaningsih, N. (2019). Meningkatkan Kemampuan Penalaran Matematik Peserta Didik Melalui Pendekatan Kontekstual. *Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers*, 287–295.
- Jalias, S. J. F. D., Arman, & Idris, F. P. (2020). Pengaruh Mutu Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Terhadap Minat Kembali Pasien Melalui Tingkat Kepuasan Di Puskesmas Tamalate Makassar 2020. *Journal of Muslim Community Health (JMCH)*, 1(2), 37–49.
- Molyadi, & Trisnantoro, L. (2018). *Pelaksanaan Kebijakan Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Kubu Raya*. 7(1), 18–23.
- Moudy, J., & Syakurah, R. A. (2022). Diagnosis Komunitas dengan Pendekatan Proceed-Precede pada Mahasiswa Kepaniteraan Klinik. *Jambi Medical Journal 'Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan'*, 10(1), 1–19.

- Ningrum, D. W. N. (2020). Pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Pelayanan Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang. *Jurnal Perspektif*, 9(1), 46–54.
- Novia, D., & Syakurah, R. A. (2022). Analisis Manajemen Program Kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau terhadap Pengawasan Makanan dan Minuman yang Beredar di Masyarakat. *Jambi Medical Journal 'Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan'*, 10(1), 101–115.
- Oktavia, L. S., Nurhidayati, & Gistituati, N. (2021). Kebijakan pendidikan: Kerangka, proses dan strategi. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 95–99.
- Pitrianti, L., & Syakurah, R. A. (2022). Analisis Program Pelayanan Kesehatan pada Ibu Hamil dan Melahirkan Dinas Kesehatan Rejang Lebong. *Jambi Medical Journal 'Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan'*, 10(1), 81–100.
- Ramdani, N. R., Nurulsyam, S. A., & Anwar, Asep Nurdin Rosihan. (2021). *Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran*.
- Septiany, F., Batara, A. S., & Patimah, S. (2021). Analisis Kesiapan Puskesmas Cendrawasih Kota Makassar dalam Implementasi Akreditasi Puskesmas Tahun 2019. *Window of Public Health Journal*, 1(5), 531–543.
- Sofiana, M., Wahyuni, R., & Supriyadi, E. (2020). Studi Komparasi Kepuasan Pasien BPJS Dan Non BPJS Pada Mutu Pelayanan Pendaftaran Puskesmas Johar Baru Jakarta Pusat. *Jurnal ABIWARA*, 1(2), 93–110.
- Stevani, Y. (2019). Proses Persiapan Akreditasi Puskesmas Kertek II. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 3(1), 12–23.
- Syafi'i, S. I., GS, A. D., & Karnain, B. (2022). Analisis Pengaruh Marketing Mix terhadap Customer Value di Pelayanan Rawat Jalan Puskesmas Kedungdoro. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1), 31–39.
- Tawalujan, T. W., Korompis, G. E. C., & Maramis, F. R. R. (n.d.). Hubungan Antara Status Akreditasi Puskesmas dengan Tingkat Kepuasan Pasien di Kota Manado. *Jurnal KESMAS*, 2018(7), 5.
- Ulumiyah, N. H. (2018). Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan dengan Penerapan Upaya Keselamatan Pasien di Puskesmas. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 6(2), 149–155.
- Wulandari, R. D., Ridho, I. A., Supriyanto, Qomarudin, M. B., Damayanti, N. A., Laksono, A. D., & Rassa, A. N. F. (2019). Pengaruh Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas terhadap Kepuasan Pasien. *Jurnal MKMI*, 15(3), 228–236.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I. D., Sadarman, B., & Yuningsih, N. (2020). Evaluasi Kinerja Distribusi Logistik KPU Jawa Barat Sebagai Parameter Sukses Pilkada Serentak 2018. *JIMEA (Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Akuntansi)*, 4(2).